



Judul	: Program Desa Korporasi Sapi
Tanggal	: Senin, 20 Februari 2023
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 7

Program Desa Korporasi Sapi

Hasil Peternak Lebih Maksimal

ROMBONGAN Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Desa Korporasi Sapi Korporasi (DKS) Syari'ah Mandalika Baren Sampi di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tujuan kunjungan kerja ini untuk berdialog dan mendengar aspirasi masyarakat atas hambatan yang dihadapi petani dan peternak dalam berproduksi.

Pimpinan Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mengatakan, pihaknya memberikan perhatian terhadap program unggulan Kementerian Pertanian (Kementan). Salah satunya, program pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak atau dikenal Desa Korporasi Sapi (DKS).

"(Program) Ini salah satu bukti keberpihakan kami kepada masyarakat petani dan peternak Indonesia," ucap politisi Fraksi PKB ini di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin.

Dia menilai, program DKS ini menjadi sangat menarik lantaran akan menjadi wadah bertemuannya beberapa kelompok peternak menjadi satu manajemen. Melalui desa korporasi sapi ini, diharapkan hasil yang diperoleh para peternak bisa menjadi jauh lebih maksimal.

Apalagi NTB ini salah satu

provinsi penyanga yang mampu menopang ketersediaan pangan nasional asal ternak, khususnya daging sapi di wilayah Indonesia Timur. Dari data yang ada, populasi sapi di NTB sebanyak 1.320.551 ekor.

"Sebagai bentuk perhatian, kami akan menjembatani kelompok ternak untuk mendapatkan bantuan pasca panen. Seperti Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan perbaikan akses jalan tamu untuk mempermudah pengambilan Hijauan Pakan Ternak (HPT)," ungkap Anggie.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lombok Tengah Muhammad Nursiah menyampaikan terima kasih kepada Kementan yang telah memberikan bantuan program DKS ini.

Dengan adanya program ini, pengembangan sapi dan kerbau di NTB bisa menjadi semakin meningkat.

"Hasilnya memang belum belum maksimal, namun secara bertahap kami akan upayakan agar lebih optimal," ungkap Nursiah.

Dia mengungkapkan, DKS di wilayahnya ini sudah berbadan hukum dengan nama Koperasi Produsen Syari'ah Mandalika Baren Sampi. Ini gabungan dari beberapa Kelompok Tan Ternak (KTT). Yakni, KTT Tandur Desi, KTT Tunas Karya, KTT Dui



LIHAT SAPI: Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini memimpin rombongan Komisi IV DPR saat kunjungan kerja reses ke kawasan peternakan sapi di Lombok Tengah, kemarin.

Urip, KTT Mekar Jati, KTT Mele Maju dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 238 orang.

Masing-masing KTT ini mendapatkan bantuan 200 ekor. Usaha yang dilakukan, yaitu penggemukan dan pembibitan sapi potong.

Sementara, Kementan memberikan bantuan program DKS yang didalamnya terdapat paket bantuan ternak, pakan, pembangunan biogas. Selain itu, fasilitasi pembangunan Rumah Potong

Hewan (RPH) sebagai sarana pendukung pasca panen.

"Potensi di NTB ini harus dioptimalkan karena banyak limbah pertanian (biomassa pakan) yang dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi pakan ternak," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Makmun.

Selain itu, lanjut Makmun, NTB juga mempunyai potensi kawasan pengembangan pakan ternak Lamtoro Taramba. Pakan

ternak akan dapat memperbaiki kualitas daging yang bisa dijadikan menu *bali beef*.

Anggota kelompok ternak DKS Syari'ah Mandalika Baren Sampi, Ade Kirman, menyampaikan terima kasih kepada Kementan yang telah memberikan bantuan program DKS.

"Alhamdulillah, keinginan kami sudah terjawab oleh Komisi IV DPR untuk mengembangkan pupuk organik. Semoga program ini membawa berkah bagi kami," ucupnya. ■ KAL